



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**

**LKjIP
2023**

Alamat :

Kantor Balai kota
Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakti
Bukit Gulai Bancah
Telp. (0752) 33369
Fax. (0752)
<http://bukittinggikota.goid>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2023 merujuk kepada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021- 2026.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan adalah sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, terukur dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKjIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja di tahun selanjutnya secara lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, implementasi maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak

sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.



Bukittinggi, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**

SURYADI, ST,MM

Nip. 19800922 201001 1010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
 BAB I PENDAHULUAN	 9
1.1. LATAR BELAKANG	9
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	10
1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI	11
1.2.2. KEPEGAWAIAN	14
1.2.3. SARANA DAN PRASARANA	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. RENCANA STRATEGIS	19
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	22
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.1.1 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA	28
3.1.2 ANALISA DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	33
3.1.3 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN	34
3.2 REALISASI ANGGARAN	36
3.2.1 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA	36
BAB IV P E N U T U P	40
 LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bukittinggi sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik daerah dan persandian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah pada Misi 2 yaitu” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**”. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*

Sedangkan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral;
3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah :

1. Sasaran : **Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Indikator sasaran yaitu :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) untuk tahun 2023 ditetapkan target kinerja 2,8 (skor). Berdasarkan Keputusan MenpanRB No.13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023, maka untuk Pemerintah Kota Bukittinggi (Dinas Komunikasi dan Informatika) dengan hasil Indeks SPBE sebesar 2,49 (skor) atau kategori “cukup”. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 88,9%. Diharapkan untuk tahun kedepan skor dari Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan semakin meningkat (kategori baik), seiring dengan adanya komitmen, Kebijakan, effort dan perbaikan sistem dalam implementasi e-government pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.
- b. Indeks keterbukaan informasi publik (skor), untuk tahun 2023 ditetapkan target indikator kinerja 93 (skor). Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Barat Nomor 02/Kep/KI-PSB/XII/2023 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 menetapkan bahwa hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 sebesar 88,05 (skor) dengan capaian 94,6%. Pencapaian skor dengan nilai 88,05 Dinas Komunikasi dan Informatika telah masuk kategori “Menuju Informatif” Hal ini dapat tercapai karena adanya upaya untuk mewujudkan pemenuhan informasi bagi publik baik yang bersifat satu arah maupun dua arah, sesuai dengan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik . Untuk pencapaian sasaran kinerja tersebut didukung oleh beberapa program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

2. Sasaran strategi : **Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral**

Sasaran ini dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral dengan target 37,5% dengan realisasi 38% atau capaian 101%. Dimana 2 aspek data statistic yang menjadi target untuk tahun 2023 yaitu pemanfaatan data statistic untuk perencanaan dan statistic bidang ekonomi telah terpenuhi. Untuk mendukung pencapaian sasaran diatas didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 1 buah kegiatan.

3. Sasaran Strategi : **Meningkatnya Keamanan Informasi**

Indikator untuk Sasaran strategis ini adalah Indeks Keamanan Informasi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah pada level II, dengan realisasi masih pada level I. untuk penilaian keamanan informasi masih dilakukan dengan system mandiri, tetapi untuk tahun mendatang penilaian tersebut akan bekerjasama dengan pihak BSSN. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas

didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

B. KINERJA KEUANGAN

Untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung dengan program dan kegiatan yang diiringi dengan ketersediaan anggaran untuk merealisasikan pencapaian sasaran kinerja dinas. Pagu anggaran yang mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar **Rp.8.035.610.540,-** dengan realisasi sebesar Rp. 7.528.250.071,-.

Berikut rekapitulasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023 :

No	Uraian	Indikator	Capaian kinerja	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks SPBE 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. 88,9% 2. 94,6%	1. 95,7% 2. 93,2%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral		101%	95,4%
3	Menigkatnya Keamanan Informasi		Level I	90,6%

Dengan telah selesainya seluruh program kerja tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan juga didukung oleh Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta infrastruktur pendukung, diharapkan seluruh *output* seluruh kegiatan, *outcomes* dari seluruh program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 akan mendukung tercapainya sasaran dan tujuan dari Dinas Kominfo serta pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Juga memberikan kontribusi, khususnya bidang TIK sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan Teknologi informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan

yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

LKjIP Dinas Kominfo Kota Bukittinggi Tahun 2023 didasari oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Secara teknis pada tahun 2023 penyusunan LKjIP masih mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja tahun 2023.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 yang kemudian dilakukan perubahan

nomenklatur baru dengan Perwako No 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok **melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.**

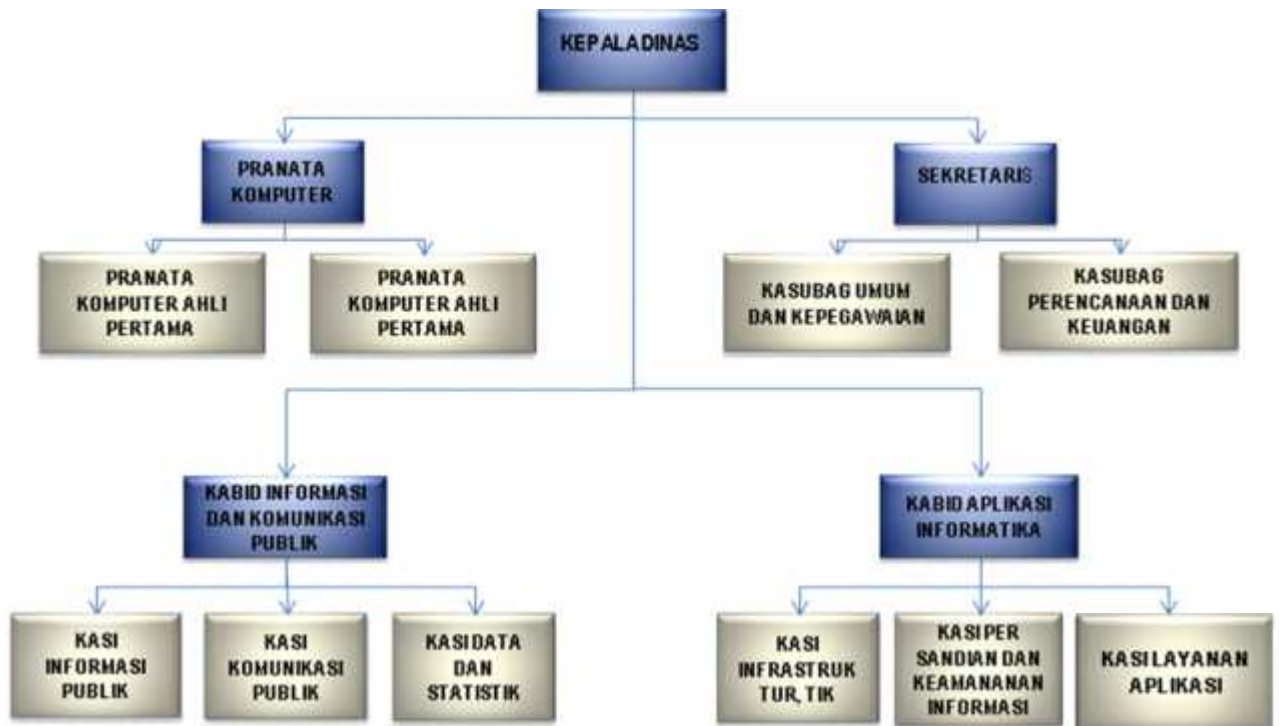
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III.a), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III.b), dan 3 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) dan 9 (Sembilan) orang Jabatan Fungsional.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN PERWAKO No 36 TAHUN 2019



**Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi**

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan kinerja Dinas;

- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika ;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Membina , mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan penggunaan anggaran bidang komunikasi dan informatika;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Jabatan Fungsional Perencana

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang Informasi dan komunikasi Publik mempunyai tiga seksi yaitu :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Data dan Statistik

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang e-government.

Bidang aplikasi Informatika mempunyai beberapa seksi yaitu :

- a. Seksi infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Konunikai
- b. Seksi Layanan Aplikasi
- c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

1.2.2. Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung oleh 38 orang yang terdiri dari 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 15 orang Pegawai Kontrak, sbb :

Tabel.1.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Pangkat /Golongan	Jumlah (orang)
Pembina Utama Muda - IV/c	1
Pembina – IV/a	1
Penata TK. I – III/d	9
Penata – III/c	3
Penata Muda Tk.I – III/b	2
Penata Muda – III/a	4
Pengatur Tk.I – II/d	0
PPPK	3
Pegawai Kontrak	15
Jumlah	38

Data Per Januari-Desember 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 38 orang pegawai memiliki tingkat pendidikan S2, S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1.2. Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	0
S2	5
S1	20
D III	5
D II	-
D I	-
SMA/SMEA/KPAA	0
SLTP	0
Jumlah	40

Data PerJanuari-Desember 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			-	II	III	IV
1	Struktural :					
	- Eselon II	1		-	-	1
	- Eselon III	3		-	2	1
	- Eselon IV	3		-	3	
2.	JFT	10		-	10	-
3.	Staf	6			6	-
4.	Pegawai Kontrak	15	15	-	-	-
	Jumlah	40	15		21	2

Data PerJanuari-Desember 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	26	65%
2	Perempuan	14	35%
	Jumlah	38	100%

Data PerJanuari-Desember 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.3 Sarana dan prasarana

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang, komunikasi dan informatika. Kondisi sarana dan prasarana relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5.
DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	Nama / Jenis barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp).	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
	PERALATAN DAN MESIN	547	6.922.650.748,-	Baik		
	a. Alat-alat Angkutan	4	422.404.00,-	Baik		
	b. Alat bengkel dan Alat Ukut	2	1.985.000,-	Baik		
	c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	494	5.730.053.098,-	Baik		
	d. Alat-alat Studio dan Komuikasi	47	768.208.650	Baik		
II	GEDUNG dan BANGUNAN	-	-	-		
	a. Bangunan Gedung	-	-	-		
	b. Bangunan Monumen	-	-	-		
III	ASSET TETAP LAINNYA	4	404.949.000,-	Baik		
	a. Buku Perpustakaan	-	-			
	b. Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	-	-			
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-			
	d. Aset Renovasi	4	409.994.000	Baik		

Data PerDesember 2023

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kpegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3. Isu Strategis

1. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan melalui saluran dan media informasi dan komunikasi baik media elektornik maupun non elektronik;

2. Kurang akses masyarakat terhadap informasi publik melalui saluran informasi yang ada.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi terutama data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
4. Pembinaan elemen informasi dan komunikasi secara berimbang;
5. Pembentukan payung hukum/ regulasi penerapan dalam pelaksanaan e_government dan percepatan menuju Kota Cerdas;
6. Koordinasi internal dalam bentuk forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas pengembangan e_government;
7. Belum optimalnya memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
8. Kurangnya kemampuan dalam mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD;
9. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik.
10. Peningkatan dan Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK;
11. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian milik Pemerintah Daerah.
12. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan keamanan informasi serta statistik.
13. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Penyusunan LKjIP, Landasan Hukum dan Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab disajikan rencana strategis SKPD dan Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan umum atas capaian kinerja SKPD dan Strategi peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah, karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis memuat Tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada tahun 2023 pengukuran indikator kinerja mnegacu kepada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun adalah :

“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”.

Sasaran Startegis

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-saran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral;
3. Meningkatnya Keamanan Informasi.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDI SI AWAL (2021)	TARGET					Tahun 2026
						TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
	Meningkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi public	Skor	0	70	92	93	94	95	96
			Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Skor	0	3	2,5	2,8	3	3,2	3,5
		Meningkatnya Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan aspek statistic sektoral	Persen	0	0	2,5	37,5	50	62,50	75
		Meningkatnya Keamanan Informasi Publik	Indeks Keamanan Informasi	Level	0	0	I	II	II	II	III

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2023 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Walikota Bukittinggi) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, yang mengacu kepada Renstra, Renja, IKU dan Anggaran.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

- 1). Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2). Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4). Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
- 5). Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks (skor)	93	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	93
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik :	Indeks (skor)	2,8	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	2,8
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Aspek Statistik Sektoral	Persen	37,5%	Triwulan III	37,5%
3	Meneingkatkan Keamanan Informasi	Indes Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II	Triwulan IV	II

Sasaran kinerja *Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai 2 indikator yaitu :*

1. **Indeks keterbukaan informasi publik**, untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar **93 (skor)**. Target ini meningkat 1 point dari tahun 2022. Peningkatan penetapan target ini mengacu kepada hasil tahun lalu dan juga parameter-parameter pendukung penetapan target ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. Salah satu parameter pendukung penetapan target yaitu

Ketersediaan Daftar informasi publik, Pelayanan informasi public dan peningkatan peran serta Lembaga Komunikasi Sosial yang berperan aktif dalam penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat atau publik.

2. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)**, ditargetkan sebesar **2,8 (skor)**. Penetapan didasarkan atas beberapa domain dan aspek yaitu domain layanan, domain tata kelola TIK dan domain Kebijakan dan domain Manajemen.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung oleh dengan program dan kegiatan. Anggaran belanja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi setelah perubahan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis (minus anggaran dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

2.3.1 Target Belanja Diskominfo Kota Bukittinggi

Tabel 2.3

No	Uraian	Target (Rp.)	Prosentase
1	Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	4.752.836.070,-	98%
2	Belanja Urusan Bidang Statistik	55.188.980,-	1,4%
3	Belanja Urusan Bidang Persandian	38.339.600,-	0,8%
	Jumlah	4.846.364.650,-	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 5 program. Program yang mendukung dalam pencapaian strategis ada 4 program. Sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp3.186.622.670,-. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.4.846.364.650,-.

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Startegis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Pagu Anggaran sebelum perubahan	Pagu Anggaran setelah perubahan
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.855.151.410	2.061.232.722,-
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (skor)	Program Aplikasi Informatika	2.754.723.080,-	2.691.603.348,-
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.092.200,-	57.812.200,-
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	51.339.600,-	38.339.600,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam RPJMD Kota Bukittinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2023 dan juga menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja Dinas Kominfo Kota Bukittinggi mengacu kepada PERMENPAN & RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintahan sampai dengan pelaporan kinerja. Dalam menentukan skal penilaian peringkat kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 20008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 54/2010 tersebut, disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut targeta beserta capaian dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	93	88,05	94%
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (skor)	2,8	2,49	88,9%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	37,5%	38%	101%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	II	II	100%

Dari tabel diatas terdapat 4 (empat) indikator untuk 3 (tiga) sasaran strategis dengan 1 sasaran yang telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	91	92	93	94	95	96	89	92	88,05	-	-	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (skor)	3	3,3	3,5	3,7	3,9	4	2,26	2,46	2,49	-	-	-
2	Meningkatnya Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	12,5	25	37,5	50	62,5	75	0	39%	38%	-	-	-
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	I	I	II	II	II	III	0	I	II	-	-	-

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kominfo Kota Bukittinggi Tahun 2023, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan, pada Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dimana visi, misi serta tujuan yang diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju *good government, clean government dan meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik*. Untuk tahun 2023 terdapat 3 sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran strategis beserta keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	93	88,05	94,6%

Pada tahun 2023 target indikator sasaran dengan skor **93**, terealisasi sebesar **88,05** dengan capaian sebesar 89% dengan kategori **“Menuju Informatif”**. Pencapaian indikator sasaran didapat dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat terhadap Pelayanan informasi yang diberikan oleh Dinas Kominfo terhadap pemohon informasi, saluran informasi yang tersedia, dapat diakses oleh masyarakat dan selalu terupdate. Untuk tahun 2023, Komisi Informasi

memberikan skor sebesar 88,05 untuk Kota Bukittinggi. Peningkatan layanan keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan amanat dari Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Hal ini didukung oleh adanya Daftar Informasi Publik dari SKPD sesuai dengan ketentuan, Pelaksanaan Desiminasi informasi kepada masyarakat dan Pemberian pembekalan terhadap Kelompok masyarakat berupa pelatihan dan pelatihan. Saat ini public sudah memiliki kesadaran bahwa informasi itu sangat penting baik untuk kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, oleh sebab itu pemerintahpun memiliki kewajiban khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan dan menyajikan informasi terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

- Untuk pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen renstra, dimana pada akhir periode renstra target untuk sasaran strategis Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan sebesar 96 (skor). Dilihat dari pencapaian sampai tahun 2022 memang mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, dimana realisasi pada tahun 2022 adalah 81,97 (skor).

- Untuk mencapai target dari sasaran ini didukung dengan program
1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 98% dan realisasi anggaran 93,2%.

Sedangkan Subkegiatan untuk menunjang pelaksanaan program diatas adalah Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media. Target dari sub kegiatan-Sub Kegiatan tersebut adalah Terlaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui saluran media, baik media cetak, elektronik dan media social, tersusunnya DIP Kota Bukittiinggi, DIP SKPD dan Sarana Layanan Informasi, Kegiatan kegiatan Pengelolaan Website Kota Bukittinggi dan Pengelolaan Pengaduan Publik

serta pengelolaan basis data Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja kegiatan-kegiatan mencapai lebih dari 90%.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,8	2,49	88,9%

- Pada tahun 2023 target indikator sasaran sebesar **2,8** terealisasi sebesar **2,49** dengan kategori **cukup**, capaian sebesar **88,9%**. Sedangkan pada tahun 2022 Capaian kinerja untuk sasaran ini juga 98%. Penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh Kemenpan RB berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan yaitu 3 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Layanan SPBE serta 7 aspek : Aspek Kebijakan tata kelola SPBE, Aspek Kebijakan Layanan SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dimana masing-masing kriteria tersebut mempunyai bobot penilaian. Dilihat dari nilai yang diperoleh maka indeks SPBE bernilai baik, tetapi nilainya masih rendah dan ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk peningkatan capaian kinerja yang terpenting adalah penyusunan Arsitektur SPBE. Aspek inilah yang belum dimiliki sehingga nilai Indeks SPBE kita masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kedepannya sehingga penilaian terhadap indikator Indeks SBPE menjadi meningkat. Disamping itu yang perlu dilaksanakan dan ditingkatkan adalah penyusunan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi terintegrasi untuk pelayanan publik, Penganggaran dan Peningkatan SDM bidang TIK, serta Implementasi e_government dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan layanan kepada publik.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut didukung dengan program dan kegiatan :

1. Program Aplikasi Informatika dengan Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.), capaian kinerja program 98% dengan realisasi anggaran sebesar 95,7%.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Subkegiatan Pelaksana analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan capaian kinerja 100 %.

Untuk melihat perbandingan tingkat capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mempunyai 2 (dua) indikator yaitu “ Indeks Keterbukaan Informasi “ dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3 (tiga) Tahun**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
			2023		2022		2021	
			target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi	1. Indeks Keterbukaan	93	88,05 (94%)	92	81,97 (89%)	70	89 (127%)

	Informasi dan Komunikasi	Informasi Publik						
--	--------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 terdapat kenaikan capaian kinerja dari indicator Indeks keterbukaan informasi public jika dibanding dengan tahun 2022 dimana capaian kinerja adalah 89% . Pencapaian kinerja pada tahun 2023 masuk dalam kategori baik dan “Menuju Informatif”. Peningkatan capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan tersedianya SDM pengelola informasi public, serta semakin lengkap Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersedia pada aplikasi PPID dan beberapa pengaduan yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3 (tiga) Tahun

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
			2023		2022		2021	
			target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	2,49 (88%)	2,5	2,46 (98%)	3	2,26 (75%)

Berdasarkan tabel untuk tahun 2023 capaian kinerja Indeks SPBE 88% terdapat penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 (98%). Penurunan ini disebabkan belum disusunnya dokumen tentang Arsitektur SPBE Kota Bukittinggi. Walaupun dalam aspek lainnya sudah tersedia kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastruktur TIK berupa pengembangan titik koneksi jaringan yang mensupport SKPD dan layanan publik dalam hal Teknologi Informasi pada tahun 2017 terdapat 77 titik koneksi dan tahun 2018 adanya penambahan sehingga menjadi 100 titik koneksi dan ditahun 2020 terjadi penambahan 10

titik koneksi sehingga menjadi 110 titik dan pada tahun 2022 terdapat 5 titik koneksi sehingga diakhir tahun 2022 terdapat 115 titik koneksi. Juga terdapat peningkatan Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi interintegrasi untuk pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e_government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik. Aplikasi terintegrasi yang dikembangkan pada tahun 2023 adalah kustomisasi Aplikasi Presensi, kustomisasi Aplikasi TPP dan Aplikasi mendukung Sistem Bukittinggi Hebat (SBH).

Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	37,5%	38%	101%

Pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan 37,5% terealisasi sebesar 38% dengan capaian kinerja 101%. Realisasi sebesar 38% didapat dari Hasil evaluasi Badan Pusat Statistik Nasional, yang mana hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,91. Jadi persentase pemanfaatan aspek statistic sectoral adalah $1,91/5 \text{ domain} \times 100\% = 38\%$. Adapun komponen penilaian adalah 5 domain yaitu Domain Prinsip Satu Data Indonesia, Domain Kualitas Data, Domain Proses Bisnis Statistik, Domain Kelembagaan, Domain Statistik Nasional. Untuk lebih jelasnya hasil penilaian secara rinci dapat dilihat pada lampiran bukti dukung yang berasal dari BPS Nasional.

Perbandingan Capaian Kinerja

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
			2023		2022		2021	
			target	Realisasi/Capaian	Target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian
	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik	37,5	38%	25%	39%	0	0%

	Statistik Sektoral	Sektoral						
--	-----------------------	----------	--	--	--	--	--	--

SASARAN III : Meningkatnya Keamanan Informasi

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100%

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada level II, setelah dilakukan penilaian mandiri didapat realisasi masih pada level II dengan capaian 100%. Poin-poin yang menjadi penilaian pada Indeks Keamanan Informasi tersebut terdiri dari terlaksananya Tanda tangan digital dan rencana untuk membentuk Tim CSIRT untuk penanganan Keamanan Informasi.

Untuk tercapainya target yang didapat dari sasaran strategis diatas didukung oleh program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi yang memuat 2 buah Subkegiatan.

Perbandingan Capaian Kinerja

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
			2023		2022		2021	
			target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian	target	Realisasi/Capaian
	Meningkatnya Keamanan Informasi Sektoral	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II (100%)	Level I	Level I (100%)	0	0% (0%)

3.1.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh ketersediaan sumber daya baik Sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian kinerja Dinas. Tahun 2023 personil pada Dinas Kominfo berjumlah 38 orang terdiri dari 6 pejabat struktur, 10 orang Fungsional Tertentu dan 12 orang Staf Pelaksana Umum dan Tenaga Kontrak.

Dengan jumlah personil yang ada, pada kenyataannya telah terpenuhi kebutuhan masing tugas dan fungsi, namun masih terkendala dengan adanya penyesuaian tugas dan fungsi terkait adanya penyetaraan dari jabatan structural ke jabatan fungsional. Tugas selanjutnya adalah dalam meningkatkan kompetensi SDM baik dibidang pemograman, jaringan, Desain Database maupun Multimedia. Dengan dukungan personil yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mewujudkan pencapaian target sasaran kinerja yang telah ditetapkan agar terrealisasi dengan hasil yang maksimal.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk mendukung pencapaian kinerja dari ke 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Kominfo adalah tersedianya ruang Data Center dan Jaringan internet dan internet yang terkoneksi ke SKPD, sekolah, puskesmas dan area publik serta dibangunnya Bukittinggi Command Center dan sarana Videotron.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

No	Uraian	Indikator	Capaian kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi (100%-(serapan anggaran*100%/capaian))
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Keterbukaan Informasi	94,6%	93,2%	-

		Indeks SPBE	88,9%	95,7%	-
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	101%	95,4%	$100\% - ((95\% \times 100\%) / 101\%) = 5,54\%$
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	100%	90,6%	$100\% - ((90,6\% \times 100\%) / 100\%) = 9,33\%$

3.1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Nasional

1. Untuk indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kota Bukittinggi memperoleh nilai dengan skor 2,49. Sedangkan Nilai Indeks SPBE untuk tingkat Nasional adalah 2,79, dengan demikian Kota Bukittinggi masih dibawah capaian Nasional.
2. Pada Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 88.05, Kota Bukittinggi menduduki posisi ke 7 dari seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Untuk Indikator Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral Dimana nilai untuk Bukittinggi memperoleh nilai Indeks Pembangunan Statistik 1,91 sedangkan untuk nasional dengan nilai 1,78. Jika dibandingkan maka nilai Kota Bukittinggi masih diatas nilai yang diperoleh Nasional.

3.1.4 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian indicator kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “baik”. Keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparaturnya Dinas Komunikasi Kota Bukittinggi dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan baik dari eselon II, III dan IV dan Fungsional yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.
2. Telah terbangunnya sinergitas Dinas Kominfo dengan SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi, Lembaga informasi, Badan Pusat Statistik baik daerah maupun Pusat serta masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.4.2 Analisa Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi, pada tahun 2023 hanya memperoleh Indeks SPBE sebesar 2,49. Nilai ini hanya meningkat sedikit dibanding tahun 2022 yang memperoleh 2,46. Hal ini dapat kami jelaskan dengan perbedaan nilai dari 4 domain di SPBE sebagai berikut :

A. Domain Kebijakan SPBE

Tahun 2022 : 1,40

Tahun 2023 : 1,50

Peningkatan ini terjadi karena pada indikator Kebijakan Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra meningkat dari bernilai 1 menjadi 2

B. Domain Tata Kelola SPBE

Tahun 2022 : 2,0

Tahun 2023 : 1,7

Perbedaan nilai ini terdapat pada tingkat kematangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE dan Tingkat Kematangan Kolaborasi yang mengalami penurunan. Hal ini hanyalah semacam perbedaan cara pandang/persepsi penilai saja terhadap data dukung kami yang mana dengan data dukung yang sama persepsi penilai tahun 2022 dengan penilai tahun 2023 berbeda yang mana hal ini tentunya diluar ekspektasi dan kendali kita.

C.Domain Manajemen SPBE

Tahun 2022 : 1,27

Tahun 2023 : 1,18

Perbedaan nilai ini terjadi karena penurunan tingkat kematangan penerapan layanan. Hal ini hanyalah semacam perbedaan cara pandang/persepsi penilai saja terhadap data dukung kami yang mana dengan data dukung yang sama persepsi penilai tahun 2022 dengan penilai tahun 2023 berbeda yang mana hal ini tentunya diluar ekspektasi dan kendali kita.

D.Domain Layanan SPBE

Tahun 2022 : 3,45

Tahun 2023 : 3,68

Pada domain ini mengalami peningkatan karena pada tingkat pelaksanaan kepatuhan implementasi layanan dengan penggunaan aplikasi umum yang telah ditetapkan dan aplikasi khusus yang dibangun sendiri kita dianggap layak mendapat nilai Sangat Baik.

2. Pencapaian indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang belum mencapai target disebabkan oleh Website yang mendukung pelaksanaan PPID tidak bisa diakses oleh Masyarakat serta terdapatnya beberapa Daftar Informasi Publik yang belum lengkap/tersedia pada Aplikasi PPID.
3. Dibutuhkan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi, statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, disebabkan teknologi informasi merupakan ilmu yang

selalu berkembang dan harus disikapi dan dibarengi dengan peningkatan kemampuan SDM.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur TI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia (website kota dan website SKPD) oleh SKPD dalam mempublikasikan informasi pembangunan daerah.
6. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi publik.
8. Masih kurang SDM dalam hal penanganan Keamanan Informasi
9. Masih kurangnya pemanfaatan data statistic sectoral oleh SKPD dalam proses perencanaan maupun evaluasi.

3.1.3.3 Analisa alternatif / Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfo Kota Bukittinggi melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Menyusun Kebijakan SPBE dan Peta Rencana yang detil disertai rencana program kedepan.
2. Perlu Menyusun SOP Layan Pusat Data.
3. Membentuk Tim Kolaborasi, penjabaran tugas Tim Koordinasi SPBE.
4. Menyusun dokumen Audit SPBE.
5. Memperbaiki dan mengkustomisasi Aplikasi PPID, sehingga Masyarakat dengan mudah untuk mengakses Aplikasi tersebut guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta melengkapi Daftar Informasi Publik.
6. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
7. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kominfo Kota Bukittinggi dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis khususnya dibidang Teknologi Informasi.

8. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.
9. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada SKPD dalam penyediaan Informasi Publik.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).
11. Perlu membentuk CSIRT untuk mendukung pelaksanaan Keamanan Informasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2023 ini akan dipaparkan capaian kinerja program berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, yaitu :

3.2.1 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian Kinerja Dinas tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja juga ditentukan oleh tingkat realisasi program dan kegiatan.

Berikut ini adalah gambaran program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja SKPD

Tabel 3.1
Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

	Program		Anggaran
--	---------	--	----------

		Anggaran	Realisasi	%	Kategori
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.061.232.722	1.921.575.515,-	93,2%	Sangat Tinggi
2	Program Aplikasi Informatika	2.691.603.348,-	2.576.603.591,-	95,73%	Sangat Tinggi
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	57.812.200,-	55.188.980,-	95,4%	Sangat tinggi
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	38.339.600,-	34.763.250,-	90,67%	Tinggi

Tabel 3.2

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program tahun 2023
(Yang mendukung capaian sasaran strategis)**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi	93	88,05	94,6%	2.061.232.722	1.921.575.515,-	93,2%
		2,8	2,49	88,9%	2.691.603.348,-	2.576.603.591,-	95,73%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	37,5%	38%	101%	57.812.200,-	55.188.980,-	95,4%
3	Meningkatnya Keamaan Informasi	Level II	Level II	100%	38.339.600,-	34.763.250,-	90,67%
Belanja Langsung Sasaran					4.848.987.870,-	4.588.131.336,-	94,6%
Belanja Langsung Pendukung					3.186.622.670,-	2.940.118.735,-	92%
Total Belanja					8.035.610.540,-	7.528.250.071	93,7%

Tabel 3.3

Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

No	Uraian	Indikator	Capaian kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi (100%-(serapan anggaran x
-----------	---------------	------------------	------------------------	-------------------------	--

					100%/capkin)
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Keterbukaan Informasi	94,6%	93,2%	-
		Indeks SPBE	88,9%	95,7%	-
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	101%	95,4%	$100\% - ((95,4\% * 100\%) / 101\% = 5,54\%$
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	100%	90,6%	$100\% - ((90,67\% * 100\%) / 100\% = 9.33\%$

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap misi dalam mencapai Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

4.1. Kesimpulan

1. Untuk sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator kinerja *Indeks Keterbukaan Informasi Publik* dengan target **93(skor)**, terealisasi **88,05(skor)** dengan capaian kinerja dikategorikan sangat baik dengan capaian **94,6%**. Sedangkan indikator kinerja *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis* dengan target 2,8 (skor) terealisasi 2,49 (skor) dengan capaian 88,9%. Diharapkan untuk tahun kedepan kedua indikator diatas akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan, perbaikan dan implementasi dari pelaksanaan e-government dan keterbukaan informasi public pada Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Sasaran strategasi Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral dengan *indicator Persentase Pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral* mempunyai target kinerja **37,5%**, dengan realisasi **38%**. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 101%.
3. Sasaran strategi Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi dimana target yang ditetapkan pada Level II dengan realisasi pada Level I, didapat capaian 100%.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan peningkatan pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah :

1. Untuk Meningkatkan pelayanan informasi public dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi khususnya informasi mengenai Pemerintah Kota Bukittinggi, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan pengaduan public, pemahaman terhadap PPID pembantu selaku pengelola informasi pada SKPD dan menyediakan layanan aplikasi untuk PLID.
2. Agar meningkatnya ketersediaan data statistic sectoral yang memenuhi kaidah standar data, metadata dan interoperabilitas data.
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi persandian yang hanya dapat diakses oleh pejabat tertentu, dapat terlaksana dengan maksimal bila didukung dengan alat pendukung utama persandian dan tenaga fungsional khusus persandian.
4. Membentuk Tim CSIRT sebagai salah usaha dalam penanganan Keamanan Informasi.
5. Meningkatkan dan mengimplemtasikan Ssitem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasias Elektronik dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Mengoptimalkan aspek pendukung terlaksananya SPBE antara lain domain Layanan, Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola.

Disamping strategi dalam pencapaian sasaran diatas, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka langkah yang perlu perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui progress dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.

2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output dan outcomes dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2023 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Bukittinggi, Januari 2024



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI

SURYADI, ST,MM

Nip. 19800922 201001 1010